



Cultural Symbol dan Politik Identitas dalam Pembangunan Kota Sampit

Thau'am Ma'rufah

UIN Sunan Kalijaga

email: amieavrily@gmail.com

Abstract

This study aims to trace the cultural symbols and identity politics that occur in the city of Sampit. This is based on several important things that happened in Sampit. Sampit is a heterogeneous and multicultural city and at the same time there were riots between the Dayak and Madura tribes around 2000, which resulted in the emptying and rejection of Madurese residents. At least in the past two decades, Sampit has turned into a city that displays an identity as a Muslim city with the emergence of urban icons built by local elite leaders. It is interesting to track what exactly is behind the elite officials in the city of Sampit in building these identity symbols and how political symbol culture plays a role in the development of the city of Sampit. The analytical tool used in this study is functional sociology where the emphasis of this study is on actors who provide change in society. The results of this study indicate that several values obsess over Cultural Symbol actions in Sampit, including; *First*, religious values, one of which orientates the cultural symbol policy is that the Sampit community is moved to worship their Lord and minimize criminal acts that used to occur frequently, such as wild speeding, theft and obscene acts. *Secondly*, art values, symbols used such as the dome and calligraphy of *Asmaul Husna* and calligraphy of Allah and Muhammad's writings are expressions of the architectural art values possessed by the Sampit regent which used to beautify the city of Sampit. *Third*, Political Interest, every policy carried out by an elite certainly cannot be separated from political interests, the Sampit regent is no exception, which in this case is to perpetuate his power, bearing in mind that the regent is in power for two periods until 2020.

Keywords:

Cultural Symbol, Politics of identity, Regent of Sampit

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk melacak *cultural symbol* dan politik identitas yang terjadi di kota Sampit. Hal ini didasarkan pada beberapa hal penting yang terjadi di Sampit. Sampit merupakan kota yang heterogen dan multikultur sekaligus pernah terjadi kasus kerusuhan antara suku Dayak dan Madura pada sekitar tahun 2000, yang mengakibatkan terjadinya pengosongan dan penolakan terhadap warga Madura. Setidaknya dalam dua dekade belakangan, Sampit berubah menjadi kota yang menampilkan identitas sebagai kota Muslim dengan munculnya ikon-ikon perkotaan yang dibangun oleh pemimpin elit setempat. Menarik untuk dilacak apa sebenarnya yang melatarbelakangi para pejabat elit di kota Sampit dalam membangun simbol-simbol identitas tersebut dan bagaimana politik *cultural symbol* itu berperan dalam pembangunan kota Sampit. Alat analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah sosiologis fungsionalis dimana titik tekan kajian ini adalah pada aktor yang memberikan perubahan dalam masyarakat. Hasil kajian ini bahwa beberapa nilai yang mengobsesi tindakan *cultural symbol* di Sampit, di antaranya yaitu; *pertama*, nilai keagamaan, salah satu yang mengorientasi kebijakan cultural simbol ini adalah agar masyarakat Sampit tergerak hatinya untuk lebih mengingat Tuhannya dan meminimalisir tindakan criminal yang dulunya sering terjadi, seperti kebut-kebutan, pencurian dan perbuatan mesum. *Kedua*, nilai seni, simbol-simbol yang dipakai seperti kubah dan kaligrafi *Asmaul Husna* maupun kaligrafi tulisan Allah dan Muhammad adalah ekspresi dari nilai seni arsitektur yang dimiliki bupati Sampit yang dipakai untuk memperindah kota Sampit. *Ketiga*, kepentingan politik, setiap kebijakan yang dilakukan oleh suatu elit tidak lepas dari kepentingan politik, tidak terkecuali bupati Sampit, yang dalam hal ini adalah untuk melanggengkan kekuasaannya, mengingat bupati tersebut berkuasa selama dua periode ini dan masih berkuasa sampai tahun 2020.

Kata kunci:

Cultural Symbol, Politik Identitas, Bupati Sampit

Pendahuluan

Sejak bergulirnya reformasi pada 1998 lalu, desentralisasi politik menghadirkan kembali wacana identitas yang selama orde baru mengalami represi oleh penyeragaman bahasa politik, serta membuka ruang politik dan administratif bagi daerah yang sebelumnya memimpikan adanya kebebasan mengatur diri secara otonom, sehingga dapat dijadikan pintu masuk untuk mengeksplorasi energi lokal.

Politik identitas dapat terlihat dari upaya-upaya yang bermula dari sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan dan

penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Politik identitas tercermin mulai dari upaya memasukkan nilai-nilai ke dalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendapatkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk munculnya perda syariah, maupun menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu, dengan memunculkan simbol-simbol agama tertentu dalam setiap pembangunannya, bahkan tak jarang hal ini sudah dimulai sejak pemilu (Saputro 2018).

Sejak terpilih menjadi bupati tahun 2010 lalu, Supian Hadi,¹ menggalakkan pembangunan kota Sampit menjadi kota yang lebih maju. Penelitian ini bermula dari kegelisahan akan munculnya simbol-simbol Islam dalam pembangunan di kota Sampit. Dalam lima tahun terakhir, terjadi pembangunan format ulang tata ruang kota. Pembangunan beberapa infrastruktur seperti ikon patung jelawat, bundaran perdamaian, Masjid agung sampit yang megah dan *Islamic Center* yang baru diresmikan Agustus 2015. Begitu juga munculnya beberapa pusat perbelanjaan dan mall di Sampit, nampaknya menunjukkan upaya pemerintah setempat untuk memajukan kota Sampit.

Namun ada satu fenomena menarik dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kotim, khususnya bupati Sampit, yang memunculkan simbol-simbol Islam dalam setiap infrastruktur yang dibangun. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa Supian Hadi ingin membuat Sampit sebagai kota Islam. Di beberapa jalan-jalan protokol, dipasang papan-papan bertuliskan Arab (asmaul husna) berikut terjemahannya.

1 Bupati sampit yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yang berpasangan dengan Taufik Mukri yang dilantik pada tahun 2010.

Tugu perdamaian, yang dulunya didirikan dalam rangka memperingati konflik Sampit, kini dibangun sebuah monumen besar berbentuk kubah dikelilingi oleh tulisan-tulisan Arab, sehingga tugu perdamaian yang hanya terbuat dari tiang ulin terkesan menjadi tenggelam oleh kemegahan monumen tersebut. Selain itu, tiang pagar rumah jabatan pun pada bagian atasnya diberi arsitektur kubah.

Berangkat dari hal tersebut, studi ini fokus membahas tentang cultural symbol dan politik identitas yang dibangun oleh aktor politik lokal. Hal itu setidaknya ada beberapa alasan, *pertama*, Kota Sampit adalah kota yang majemuk dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, dimana terdapat berbagai macam penduduk dengan berbagai macam suku, bahasa dan agama. Dengan penampilan simbol-simbol Islam di ruang publik sampit ini, menurut beberapa teori akan memicu pertarungan identitas, yang berpotensi pada terjadinya konflik, namun dalam kasus sampit, kemunculan simbol ini malah menjadi modal yang mendorong popularitas bupati Sampit, dan mengantarkannya menjadi bupati untuk yang kedua kalinya. *Kedua*, Sampit adalah kota yang tidak mempunyai pengalaman sejarah Islam yang menonjol sebagaimana Tuban di Jawa Timur yang terkenal dengan kota wali karena menjadi salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Atau Gorontalo yang mempunyai memori kolektif (Rahim 2010),² sehingga menjadikannya daerah yang kental dengan nuansa Islam. Akan tetapi, muncul pertanyaan mengapa simbol-simbol Islam yang dimunculkan? Mengapa bukan simbol-simbol keetnisan yang lebih relevan dengan budaya lokal di Sampit? Dan apa yang mengobsesi bupati sampit dalam memunculkan simbol-simbol tersebut?

2 Memori kolektif pertama adalah perjanjian *udulawo limo lo Pabalaa*. Konsesus lokal yang disertai peletakan basis nilai lokal; adati *bulo-buloa to syaraa* (adat yang menundukkan pada syariah), *syaraa bulo-buloa quruani* (Syariah yang mendasarkan pada al-Quran) ini adalah perjanjian yang terjadi pada 1672 yang menjadi akhir dari peperangan antara kerajaan Limboto dan Hulondalo dan menjadi *social stock of knowledge* tersendiri bagi masyarakat Gorontalo dan menjadikan memori awal untuk mengkonsolidasikan peradaban secara kolektif.

kepentingan-kepentingan politik apa yang berkelindan di dalamnya?. Untuk itu penelitian ini penting dilakukan.

Semakin menguatnya gelombang politik identitas memang kerap kali menjadi persoalan. Identitas yang menguat sering kali menjadi pemicu konflik antar kelompok, baik atas nama agama, etnis ataupun yang lainnya. Sebab, tak jarang masing-masing kelompok melakukan klaim kebenaran. Dalam beberapa periode belakangan, kajian tentang politik identitas terus marak dilakukan oleh sejumlah peneliti. Tak sedikit kajiannya diarahkan untuk melihat menguatnya politik identitas yang dilakukan oleh agama-agama lokal seperti aliran kebatinan, dan sebagainya sebagaimana kajian (Hakiki 2011), (Hamid 2018), (Maksum 2015). Selain itu, melalui kajian (Abbas 2016), tentang kebangkitan identitas Papua yang merasa terdiskriminasi. Dari kajian itu, terlihat bahwa tidak hanya agama yang berpotensi menimbulkan konflik, akan tetapi semangat kesukuan juga sangat besar mempunyai potensi perpecahan. Sayangnya, tak jarang semangat identitas etnis ataupun agama dijadikan alat untuk merebut kekuasaan sebagaimana kajian (Fikri 2018), yang mengkaji tradisi *wong kito* di Palembang, meskipun pada akhirnya hal itu dapat juga dijadikan sarana untuk melakukan negosiasi kebijakan yang berpihak kepada mereka. Imam Setyobudi (Setyobudi 2017) mengkaji politik identitas dalam penciptaan koreografi *Animal Pop-Dance*. Melalui pendekatan post-kolonial, ia mengatakan bahwa penciptaan koreografi *Animal Pop-Dance*, yang merupakan suatu hip-hop Indonesia yang lahir dari tumbuh di Amerika dan Afrika, kemudian dipadukan dengan tradisi Jawa, Sunda, dan Papua, kemudian disinyalir ingin melepaskan hasrat anti kolonialisme. Artinya bahwa politik identitas yang dimainkan adalah budaya hybrid cengkraman dikotomis paska kolonialisme. Dalam hal ini, Integrasi kebangsaan menjadi penting dalam kerangka kesatuan.

Berangkat dari beberapa kajian yang disebutkan di atas belum ada satupun yang fokus pada masalah politik identitas di Sampit. Beberapa

kajian yang fokus melihat Sampit misalnya (Suryani 2012), fokus melihat resolusi konflik antara Sambas dan Sampit sebagai wilayah yang pernah terjadi kerusuhan yang cukup mencengangkan. Selain itu, (Khoiruddin Bashori, Abd. Madjid 2012) mengkaji dinamika konflik dan integrasi etnis antara Dayak dan Madura di Yogyakarta, Malang, dan Sampit. Dengan metode kuantitatif, Khoiruddin menyimpulkan bahwa agama menentukan kualitas konflik antara Dayak dan Madura, disamping korelasi antara status sosial, ekonomi dan Pendidikan. Kajian lain sebagaimana dilakukan (Belly and Widjajanti 2017), fokus melihat persepsi masyarakat Sampit yang tinggal di daerah tepian sungai di Baamang, Sampit dengan pendekatan kuantitatif. Sehingga kajian tentang cultural symbol dan politik identitas sebagaimana kajian ini, berbeda dengan kajian-kajian lain yang telah dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif³ yang sumber penelitiannya dikumpulkan melalui kajian pustaka dan lapangan (Bagong Suyanto 2011). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis fungsionalis dimana titik tekan kajian ini adalah pada aktor yang memberikan perubahan dalam masyarakat. Penelitian ini mengambil lokasi di Sampit yang merupakan ibukota dari kabupaten kotawaringin Timur, namun belum menjadi kotamadya secara terpisah, masih menjadi satu dalam kabupaten kotawaringin Timur. Dan dikarenakan wilayah kabupaten Kotawaringin Timur sangat luas, maka setting lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan dominasi simbol-simbol yang terlihat. Wilayah yang dijadikan lokasi penelitian adalah wilayah yang disana terdapat simbol-simbol yang terlihat secara dominan yaitu kecamatan Baamang dan Mentawa baru Ketapang. Selain itu, wilayah ini juga dipilih karena

3 Penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti, yang mempunyai karakteristik yaitu: bersifat induktif, Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian, menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris, dan bersifat humanistik.

wilayah ini adalah wilayah yang majemuk dimana terdapat berbagai macam etnis, agama dan bahasa yang sedang melakukan pembangunan untuk mewujudkan daerah yang lebih maju. Wilayah ini juga dipilih karena merupakan representasi dari wilayah yang tingkat heterogenitasnya tinggi namun simbol-simbol identitas agama ditampilkan di ruang publik, oleh elite pemerintahannya.

Elite lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bupati Kotim. Bupati yang dimaksud adalah pasangan bupati Supian Hadi dan Taufik Mukri. Mengapa bupati ini? Karena bupati inilah yang gencar-gencarnya melakukan pembangunan dengan memunculkan *cultural symbol* dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Adapun momentum kontemporer yang menjadi fokus studi ini adalah dimulai ketika Supian Hadi dan Taufik Mukri dilantik sebagai Bupati Sampit, pada Juni 2010 sampai pilkada 2015 dimana dia mencalonkan kembali sebagai bupati. Penulis menggunakan pendekatan mikroskopik dimana tidak semua *cultural symbol* yang penulis jadikan sample, penulis hanya mengambil simbol-simbol yang lebih dominan terlihat di kota Sampit.

Kota Sampit, Sistem Budaya dan Keberagaman

Sampit⁴ adalah ibu kota dari kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat di Kalimantan Tengah lebih mengenal Kotawaringin Timur dengan sebutan Sampit. Sampit sebagai ibu kota Kotawaringin Timur merupakan kota terpenting di provinsi Kalimantan Tengah, terutama dalam bidang ekonomi, karena merupakan kabupaten yang relatif maju juga karena terletak di posisi yang strategis.

4 Karena luasnya daerah Kotawaringin Timur dan ibukotanya yaitu Sampit belum menjadi kotamadya, maka yang dimaksud Kota Sampit dalam penelitian ini adalah wilayah yang mencakup kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dipilihnya kecamatan ini karena kecamatan tersebutlah yang kepadatan penduduknya paling banyak dan yang letaknya di pusat kota/pemerintahan, dimana terdapat simbol-simbol keagamaan yang terlihat lebih dominan.

Kabupaten ini terletak di antara 112°7'29" dan 113°14'22" Bujur Timur dan antara 1°11'50" dan 3°18'51" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 16.796 km² yang merupakan 10,94 persen dari jumlah keseluruhan provinsi Kalimantan Tengah. Secara Topografis, wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan dataran rendah yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah memanjang dari timur ke barat (Notapiri 2017).

Dilihat dari peta regional Kalimantan Tengah, kota Sampit terletak di tengah-tengah, dan ini menyebabkan posisinya menjadi sangat strategis. Oleh karena itu di Sampit dibangun Pelabuhan, sehingga ketika warga dari kabupaten lain seperti Palangkaraya, Kasongan, Buntok maupun daerah lainnya hendak ke pulau Jawa dengan menggunakan transportasi air, maka lebih dekat jika melewati kota Sampit daripada harus ke kota Banjarmasin. Posisi strategis tersebut menjadi keunggulan kota Sampit sehingga semakin meningkatkan kemajuan kotanya, terutama dalam bidang perekonomian.

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang menjadi wilayah penelitian ini merupakan salah satu dari 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang terletak di ibukota kabupaten (Pusat pemerintahan). Berdasarkan letak wilayah, kecamatan Mentawa Baru Ketapang di Bagian Utara berbatasan dengan kecamatan Baamang, bagian barat berbatasan dengan sebagian kecamatan Baamang dan kecamatan Mentaya Hilir Utara, Bagian timurnya berbatasan dengan kecamatan Seranau, dan Bagian selatan berbatasan dengan kecamatan Mentaya Hilir Utara (Notapiri 2017).

Secara administratif, Kabupaten Kotawaringin Timur hingga Desember 2016 membawahi 17 kecamatan dan 168 desa. Selama tahun 2016 tidak terjadi pemekaran baik ditingkat kecamatan maupun desa/ kelurahan dan kecamatan Telaga Antang merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yakni 18 desa. Karena luasnya daerah kabupaten, maka untuk satu kecamatan saja luasnya bisa mencapai 700 km². Tentu saja sangat berbeda dengan daerah di Jawa yang dalam satu kota kecamatannya saling berdekatan. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada satu kecamatan yang terletak di ibukota Sampit dan yang paling banyak terlihat simbol-simbol keagamaannya.

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang menjadi wilayah penelitian ini adalah kecamatan yang memiliki luas wilayah sebesar 726 km² yang memiliki 11 desa atau kelurahan (Kotim 2017)⁵ dengan kelurahan yang terluas adalah kelurahan Pasir putih yaitu sebesar 50,27 persen dari luas wilayah kecamatan, sementara itu yang mempunyai luas terkecil adalah desa telaga Baru dengan luas 1,44 persen dari luas wilayah kecamatan. Kelurahan yang paling dekat jaraknya ke ibukota Sampit adalah kelurahan Mentawa Baru Hilir dan yang paling jauh jaraknya ke ibukota adalah kelurahan Bapangang Raya (Kotim 2017).

Jumlah penduduk kotawaringin Timur terus mengalami peningkatan. Baik karena pertumbuhan alami maupun karena perpindahan penduduk. Berdasarkan proyeksi hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk kabupaten Kotim mencapai 436.276 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 2,37 persen dari tahun sebelumnya. Dengan wilayah seluas 16.796 km² kepadatan penduduk kotim sebesar 26 jiwa per km². Dan kecamatan yang terpadat adalah kecamatan yang jaraknya dekat dengan ibukota yaitu kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan kepadatan penduduk 118 jiwa/km². Hal ini menandakan bahwa persebaran penduduk di kabupaten ini masih kurang merata (Notapiri 2017).

Secara umum, Jumlah penduduk laki-laki di Kotawaringin Timur lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini bisa dilihat dari sex ratio yang nilainya 112, dimana lebih besar dari 100.⁶ Jumlah penduduk ini juga didominasi oleh penduduk usia muda.

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Sampit, Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dari data statistic 2014, diketahui

5 Desa atau kelurahan tersebut adalah Pelangsian, Ketapang, Mentaawa Baru Hilir, Mentawa Baru Hulu, Sawahan, Bapeang, Eka Bahurui, Pasir Putih, Telaga Baru, Bangkuang Makmur dan Bapanggang Raya.

6 Sex ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu. Patokannya adalah pada angka 100. jika diperoleh hasil lebih dari 100 maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Sebaliknya jika kurang dari 100 maka jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit. Contoh: Jika diperoleh sex ratio sama dengan 112, maka bisa dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki laki.

bahwa daerah kecamatan mentawa baru ketapang yang letaknya di ibukota dan memiliki populasi penduduk paling padat, agama islam merupakan agama mayoritas dari enam agama yang ada di daerah ini. Tercatat 93,57 persen menganut agama Islam, urutan kedua 3,15 persen menganut agama Kristen dan sisanya menganut agama katolik, hindu budha dan lainnya (Kotim 2017).

Bisa dilihat bahwa memang 90 persen masyarakat Sampit memeluk agama Islam. Meski demikian, tercatat bahwa tempat-tempat ibadah setiap agama terus bertambah, sehingga mencerminkan bahwa walupun terdapat berbagai macam agama di daerah ini, namun penduduknya dapat hidup saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing.

Sebelum Islam datang di pulau Kalimantan, daerah ini berada dalam pengaruh Hindu Budha. Di samping beragama Hindu Budha, rakyat Kalimantan juga memiliki kepercayaan leluhur yang disebut dengan Kaharingan (Mahin 2009)⁷, walaupun penyebutan ini sejak tahun 1944 belum dipakai secara luas. Pada 1945 nama Kaharingan diajukan kepada Pemerintah Jepang di Banjarmasin, sebagai penyebutan bagi agama Dayak. Pada 1950 dalam kongres sarikat Kaharingan Dayak Indonesia, kata kaharingan secara resmi dipakai sebagai nama generik untuk agama dayak. Kemudian pada 1980, Kaharingan berintegrasi dengan Hindu sehingga menjadi nama Hindu Kaharingan. Hal ini karena Kaharingan mempunyai kesamaan prinsip dasar dengan agama Hindu (Mahin 2009).⁸

7 Nama kaharingan berasal dari kata *danum kabaringan* (air kehidupan) yang merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat dayak dan juga substansi yang maha berharga di alam semesta karena berdaya untuk mendatangkan kehidupan abadi dan dipergunakan oleh Raying Mahatalla Langit untuk menghidupkan kembali jiwa orang yang meninggal dunia agar dapat hidup kekal di surga.

8 Bagi Departemen Agama, Kaharingan adalah sekte dari agama Hindu. Pada tahun 2003 badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen agama menyimpulkan bahwa: "Berdasarkan hasil kajian dan penelitian lapangan, Kaharingan adalah aliran kepercayaan yang bersifat keagamaan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat dayak di kalimantan. Keberadaan kaharingan ini memang telah diakui eksistensinya oleh pemerintah dan mendapat bimbingan dari Departemen Agama. Akan tetapi keberadaan kaharingan bukan dipandang sebagai sebuah agama resmi, melainkan

Sebelum konflik Sampit tahun 2001, Pandangan masyarakat umum tentang Kaharingan kurang menyenangkan. Agama Kaharingan sering dimaknai sebagai kepercayaan yang mengutamakan aspek animisme-dinamisme. Pandangan masyarakat awam yang demikian itu juga dibenarkan oleh seorang peneliti Barat, Anne Mason Banwell, yang menyatakan “Dulu, semua orang Dayak menganut salah satu agama asli yang berdasarkan konsep dinamisme. Agama asli penduduk di daerah Kalimantan Tengah disebut ‘Kaharingan’ (Mahin 2009).

Meskipun Kaharingan telah mendapat status sebagai agama resmi dengan menyandang nama agama Hindu Kaharingan namun pesona agama ini agak memudar bagi generasi muda karena ada kesan atau image bahwa beragama Hindu Kaharingan itu ‘kuno’ atau ‘animistik’ sehingga tidak mengherankan populasi penganut agama ‘Hindu’ Kaharingan hanya sekitar 20 persen di Kalimantan Tengah. Sebagian besar orang Dayak yang lainnya menganut agama Islam yakni antara 50 persen sampai dengan 70 persen, sedangkan penganut agama Kristen kira 10 sampai dengan 15 persen dan penganut agama Katolik sekitar 5 persen (Purnawa 2016).

Namun konflik tahun 2001 dinilai telah memberikan suatu legitimasi kultural yang sangat kuat bagi orang dayak khususnya penganut agama Kaharingan. Sebagai entitas sosio-kultural agama kaharingan selayaknya diperhitungkan dalam sistem sosial politik di Kotawaringin Timur, dan menggambarkan adanya proses revitalisasi identitas primordial khususnya identitas dayak dan agama aslinya yaitu Kaharingan. Setelah sekian lama agama Kaharingan dipandang hanya sebagai kepercayaan animisme-dinamisme yang berbeda dengan agama resmi pemerintah.

Dilihat dari sosio historisnya, nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat sampit asli yang diambil dari budaya kaharingan sejak dahulu adalah: pertama, *Belom Bahadat*, yang merupakan prinsip bagi masyarakat Dayak yang harus mempunyai sopan santun atau menjunjung tinggi adat.

sebagai bagian dari aliran agama Hindu, dan arena itu bimbingan terhadap aliran ini berada di bawah direktorat Jenderal Masyarakat Hindu Budha”.

Sopan santun dan tata krama diikat oleh sanksi sanksi hukum *hadat* yang dipelihara secara turun temurun dari para leluhur mereka. Hukum *hadat* meliputi tata pergaulan sehari-hari antar warga yang harus saling menjaga martabat setiap orang, juga mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya misalnya terkait dengan sistem bercocok tanam di ladang, berburu dan meramu di hutan.

Fungsi sosial kelembagaan *hadat* yang dikembangkan atas dasar hubungan manusia dengan lingkungan hutan sebagai kawasan pemukiman merupakan *ecological wisdom* yang selama ini dipegang teguh sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Hukum *hadat* juga mengatur masalah perselisihan antar warga masyarakat, dari yang ringan sampai yang berujung pada pembunuhan. Mereka yang bersalah menurut peradilan *hadat* akan dikenakan sanksi (Purnawa 2016).

Pelanggaran terhadap hukum *hadat* secara berulang-ulang apalagi menyangkut penumpahan darah baik sengaja maupun tidak sengaja sangat berat sanksinya karena dianggap telah mengganggu hubungan antar sesama manusia dan keseimbangan hukum kosmos yang mengakibatkan datangnya suatu bencana atau malapetaka yang dahsyat. Oleh karena itu, *hadat* bagi orang dayak harus dihormati. Dengan melaksanakan hukum *hadat*, orang dayak percaya bahwa itu akan membebaskan mereka dari berbagai macam malapetaka. Peristiwa kerusuhan di Sampit dipandang oleh orang dayak terjadi karena pelanggaran hukum secara berulang-ulang dan sengaja dilanggar tanpa pernah bersedia melaksanakan sanksi *hadat*. Kerusuhan tersebut bagi orang dayak dipercaya sebagai contoh atau hikmah tentang akibat pelanggaran hukum *hadat* yang dilakukan secara berulang-ulang di bumi orang dayak.

Kedua *huma betang* adalah rumah panjang, bangunan tempat tinggal secara kolektif warga masyarakat dayak pada masa lalu. Gambaran tentang masyarakat dayak sebagai suatu kesatuan geneologis, sosial dan politik tercermin dalam kompleks pemukiman orang dayak yang terdiri dari satu atau beberapa *huma betang*. *Huma Betang* ini tidak hanya

bernilai secara material sebagai tempat tinggal warga masyarakat dayak, namun juga memiliki makna sosio-kultural yang sangat penting bagi tata kehidupan sosial masyarakat dayak. Pada masa lalu, kultur dan struktur sosial masyarakat dayak dapat dipahami dari sistem relasi sosial warga penghuni huma betang. Penghuni huma Betang adalah kesatuan social yang terbentuk karena factor genealogis, terikat oleh hubungan kekerabatan dan beberapa komunitas huma betang tersusun menjadi satu struktur social komunitas orang dayak yang memiliki satu sistem sosial tersendiri dipimpin oleh seorang demang dan memiliki wilayah territorial berupa area pemukiman, tempat keramat ladang dan hutan. Komunitas orang dayak tersebut bersifat otonom karena kepemimpinan seorang demang dipertanggungjawabkan kepada warga komunitasnya, tidak dikenal suprastruktur di atas pemerintahan adat yang dipimpinnya.

Kehidupan sosial di suatu *huma betang* dilandasi oleh rasa solidaritas sosial, gotong royong dan diikat oleh norma sosial yang disebut hukum adat atau *belom bahadat*. Ungkapan bumi dipijak langit dijunjung dalam tradisi kebudayaan masyarakat dayak tidak hanya merupakan sebuah peribahasa, melainkan sebuah pandangan hidup dan etika hubungan sosial di tengah heterogenitas etnis dan agama di wilayah tersebut. *Belom Penyang Hinje Simpei*, yang artinya adalah bahwa orang hidup haruslah penuh kerukunan dan menjaga persatuan demi kesejahteraan bersama.

Standar kebudayaan dayak tersebut cukup berhasil dalam upaya mengkontruksi sosial dan membangun kembali kerukunan masyarakat pasca konflik. Masyarakat dayak dan masyarakat etnis lainnya telah menerima kembali warga Madura. Dua atau tiga tahun setelah peristiwa itu, orang Madura telah dapat kembali untuk bersama-sama bermasyarakat dan bekerja mencari nafkah, dan berangsur-angsur hingga saat ini. Sementara di sisi lain, etnis lain juga turut memberikan sumbangsih bagi terciptanya situasi damai pasca konflik. Beberapa etnis seperti Banjar dan Jawa telah lama dikenal sebagai masyarakat yang terbuka dan ramah. Banjar juga

dikenal sangat memegang teguh nilai-nilai ajaran Islam. Sementara Madura yang kembali juga telah bersedia melakukan perubahan-perubahan sikap yang baik dalam berhubungan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Pengalaman marginalisasi dayak di masa lalu sampai terjadinya konflik telah mendorong budaya dayak menjadi budaya yang dominan, yakni pemosisian status social tinggi dan sejumlah keistimewaan di banding budaya lain. Walaupun budaya dayak ini menguat, namun faktor instrinsik budaya dayak sejak awal juga sangat mendukung terciptanya kerukunan di Sampit. Etnis dayak memiliki nilai-nilai budaya *huma betang* yang sangat toleran terhadap keberadaan orang lain, ketaatan pada aturan, dan juga kesetaraan. Hal ini juga menunjukkan kebersediaan untuk hidup rukun saling menghormati dalam satu kehidupan bersama.

Cultural Values dalam Pembangunan Kota Sampit

Cultural studies memahami bahwa politik merupakan pusat diskursus kekuasaan untuk mendeskripsikan dan mengatur baik identitas kebudayaan maupun tindakan sosial. Bennet sebagaimana dikutip oleh Mudji Sutrisno mengatakan bahwa *cultural studies* bisa digunakan sebagai pendekatan yang lebih pragmatis. Pragmatis di sini berarti bersedia bekerja sama dengan produsen kebudayaan dan bersedia memasukkan kebijakan, lebih jauh lagi dia mengatakan bahwa bidang kebudayaan saat ini semakin diorganisasikan dan dikonstruksi dalam kerangka pemerintahan (Sutrisno, n.d.).⁹

Nilai-nilai kultural yang ada di Sampit seperti *belom bahadat* dan *huma betang* adalah nilai-nilai yang menjadi benteng kerukunan di Sampit yang multi kultural. Nilai-nilai ini kemudian menjadi pijakan dalam membangun sampit pasca kerusuhan yang memporak-porandakan kota ini. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada masa itu memandang sangat penting dua filosofi masyarakat dayak tersebut untuk direvitalisasi dalam tata kehidupan masyarakat Sampit, sehingga dalam Peraturan daerah

9 (Sutrisno, n.d.) hlm.178.

Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik pada bab 1 pasal 1 nomor 20 disebutkan : “*Belom Bahadat* adalah suatu keyakinan untuk menjunjung tinggi tatanan/nilai-nilai/norma/ kaidah ketatakeramaian yang merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat setempat. Sedangkan *huma betang* diartikan sebagai suatu prinsip kesetaraan hidup, kebersamaan, kegotongroyongan yang mencerminkan sikap menghormati adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat.” Di ayat lain disebutkan bahwa untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat kabupaten Kotawaringin Timur yang damai, mandiri dan demokratis sebagaimana filosofi ‘*Huma Betang*’ dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

Dari regulasi ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah mengakui dua prinsip budaya dan filosofi orang dayak ini, yang selanjutnya akan menjadi payung dalam masyarakat multikulturalisme di Sampit. Dan dapat diakui bahwa konflik sampit telah memberikan suatu legitimasi cultural yang sangat kuat bagi orang dayak dan budaya yang dianutnya.

Setelah konflik, terpilih untuk pertama kalinya seorang tokoh dayak penganut Kaharingan sebagai anggota legislatif, memberikan suatu tanda yang jelas bagi eksistensi agama Kaharingan sebagai salah satu identitas asli warga masyarakat Kotim. Pembangunan Tiang Pantar atau yang dikenal sebagai tugu perdamaian dianggap sebagai peringatan bagi semua pihak terhadap peristiwa konflik berdarah tahun 2001. Tiang pantar dalam tradisi agama Kaharingan dianggap sebagai symbol kesempurnaan arwah orang yang meninggal dunia, yakni kembalinya arwah kepada ‘Ranying Mahatara Langit’. Tidak jauh dari tiang pantar itu juga dibangun untuk pertama kalinya di Sampit ‘Balai Basarah’ atau gedung tempat warga penganut agama kaharingan melakukan kegiatan peribadahan. Kemudian pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga menetapkan upacara adat ‘*mamapas lewu*’ yang diangkat dari tradisi agama Kaharingan sebagai

upacara resmi yang diadakan setiap tahun oleh pemda Kotim bersama masyarakat. Mamapas artinya menyapu, sehingga dalam konteks upacara adat dayak bermakna “membersihkan atau menyucikan”. *Lewu* berarti desa atau kota tempat pemukiman masyarakat, sehingga upacara memapas lewu dimaksudkan untuk membersihkan desa atau kota tempat pemukiman penduduk dari unsur-unsur kejahatan yang akan berpengaruh buruk terhadap ketentraman dan keamanan warga masyarakat.

Pemerintah daerah juga memfasilitasi masyarakat dayak dalam wadah lembaga adat yang dipandang memiliki otoritas dalam masyarakat dayak yaitu Dewan Adat Dayak yang berfungsi menjaga keharmonisan tata kehidupan masyarakat adat, norma-norma, pranata-pranata, dan nilai-nilai budaya. Dengan demikian peran utama lembaga tersebut adalah mencakup pelestarian budaya dayak dan sekaligus menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat dayak yang lebih menyandarkan segala urusannya pada kebudayaan adat ketimbang dengan agama.¹⁰

Simbol Sebagai Identitas Politik Elit Sampit

Pengertian kata simbol berasal dari kata Yunani *Sylobos* yang berarti tanda atau ciri yang memberi tahu suatu hal kepada seseorang. Simbol atau lambang adalah tanda seperti lukisan, perkataan, lencana dan sebagainya yang menyatakan suatu hal mengandung maksud tertentu, misalnya warna putih lambang kesucian, padi lambang kemakmuran dan kopian merupakan salah satu tanda pengenal bagi warga negara Republik Indonesia (Herusatoto 1998).

Ada banyak sekali definisi tentang simbol, tetapi secara garis besar bisa dikatakan bahwa simbol adalah suatu hal atau tindakan yang memimpin pemahaman subyek terhadap obyek. Untuk mempermudah penyelidikan simbol, maka dibagi menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, Simbol yang berwujud benda (visual) misalnya jilbab, peci, baju koko, lambang kebudayaan dan lainnya. *Kedua*, simbol yang berwujud kegiatan (mitos)

10 Wawancara dengan Luwing salah satu anggota dewan adat dayak Sampit.

misalnya cara berdoa, atau apapun peringatan-peringatan religius maupun mistik yang biasanya menghadirkan masa lampau sebagai daya dorong dalam memperjuangkan hidup. *Ketiga* simbol yang berwujud bunyi (Audio) misalnya musik, syair dan sebagainya.

Suatu individu maupun komunitas secara sadar maupun tidak sadar memilih simbol-simbol dan mengasosiasikan dirinya ataupun komunitasnya sesuai dengan nilai dan motivasi yang dimilikinya. Simbol merupakan “informasi” yang efektif untuk mengenali keberadaan maupun identitas suatu individu ataupun komunitas. Dengan menampilkan simbol, seseorang tidak perlu susah-susah menjelaskan sesuatu, karena semua bias dijelaskan dengan simbol.

Beberapa simbol yang dipakai Bupati Sampit sebagai identitas politiknya di antaranya yaitu; Agama, dimana simbol-simbol keagamaan kerap digunakan para elit untuk menunjukkan identitas dirinya, sekaligus untuk menarik simpati masyarakat. Hal ini juga yang dilakukan oleh bupati Sampit. Islam yang menjadi agama mayoritas di Sampit sangat memungkinkan untuk dijadikan alat politik. Selama pemerintahannya simbol-simbol agama Islam sangat terlihat terutama pada setiap pembangunan infrastruktur yang dia bangun. Seni arsitektur Islam seperti kaligrafi dan kubah terlihat mewarnai kota Sampit.

Kedua, Gaul (*Fashionable*) yang dalam hal ini, bupati Sampit Supian Hadi ini mencitrakan diri sebagai pejabat public yang nyentrik dan berbeda dengan para bupati pada umumnya. Tak sulit baginya untuk menunjukkan sikap itu, sebab sebelum menjabat sebagai bupati sampit, bupati ini adalah anak band. Penampilannya sangat gaul ala anak-anak milenial dan modis. Sehari-harinya, di luar memakai seragam bupati ini lebih sering memakai jeans dan kaos yang modis.

Ketiga, Merakyat, yang menunjukkan sosok Supian Hadi dikenal masyarakat sebagai bupati yang merakyat dalam artian dekat dengan masyarakat. Diakui masyarakat Sampit yang peneliti temui, Supian

Hadi sering terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat menyaksikan langsung dinamika dan permasalahan yang dialami masyarakat Sampit dan mendengarkan langsung keluhan kesah mereka, yang dalam tradisi politik dikenal dengan istilah “blusukan”.

Cultural Symbol dalam Pembangunan

Menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap orde kekuasaan untuk menciptakan sistem simbol yang mencerminkan identitas yang khas. Bagi yang mampu memegang simbol maka ia dapat mengejawatahkan dirinya seperti apa yang disimbolkan. Jika demikian maka dia dapat menjalankan praktik kekuasaannya atas nama simbol yang dia ciptakan. Wacana terorisme misalnya, digunakan oleh pemerintah untuk menentukan kelompok mana yang disebut teroris dan mana yang bukan. Terorisme sebagai wacana simbolik dijadikan modal politik bagi pemerintah dalam mengesahkan UU terorisme yang memberikan payung hukum sah untuk melakukan praktik politik, seperti membuat kategori teroris hingga ke proses penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dikategorikan teroris (Fanzuri 2017).

Bupati Sampit mengekspresikan simbol-simbol Islam dalam pembangunan infrastruktur yang dia kerjakan seperti membangun *Islamic Centre*, juga memasukkan simbol tersebut ke dalam arsitektur bangunan seperti memasang kaligrafi asmaul husna di beberapa jalan protokol, kubah hijau di setiap kantor dinas, dan membuat nuansa Islam di bundaran Belaga (tugu perdamaian) dan juga taman kota dengan memberikan seni kaligrafi dan kubah yang megah dalam seni arsitekturnya.

Tindakan politik bupati ini yang mengekspresikan simbol ke dalam sebuah arsitektur bangunan merupakan *cultural symbol* dimana dalam hal ini merepresentasikan *social life* dari Bupati Sampit maupun dari masyarakat Sampit tersebut.

Asumsi dasar teori interaksionisme simbolik mengatakan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berfikir yang dari situ kemudian

aktor tersebut melakukan interaksi dalam kesehariannya, termasuk interaksi dalam masalah politik. Dalam proses interaksi itulah dia memahami makna dari simbol-simbol tertentu, sehingga merangsangnya untuk menentukan pilihan sebelum kemudian melakukan tindakan. Blumer mengatakan bahwa tindakan manusia tidak disebabkan oleh “kekuatan luar” tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam”, tetapi didasarkan pada pemaknaan atas sesuatu yang dihadapinya lewat proses yang disebut sebagai *self-indication*. Proses tersebut adalah proses komunikasi pada diri individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut (Elbadiansyah 2014).

Sejak dilantik menjadi Bupati, Supian Hadi dikenal sebagai sosok yang nampak religius. Tidak dipungkiri, para elit politik seringkali menggunakan simbol-simbol agama untuk melegitimasi kepemimpinannya. Peci, sarung ataupun jilbab bagi perempuan kerap digunakan oleh para elit yang beragama Islam untuk menunjukkan identitas dirinya, sekaligus untuk mendapatkan dukungan dan image yang positif di masyarakat. Hal ini juga yang dilakukan oleh Supian Hadi sebagai Bupati Sampit. Dari beberapa kebijakan yang diberlakukannya, sedikit mencerminkan bahwa Bupati ini adalah sosok yang agamis. Seperti kebijakannya di bulan Ramadhan yang mengharuskan warung makan tutup di siang hari Ramadhan dan baru bisa dibuka setelah pukul 15.WIB.¹¹ Menurutnya, pemberlakuan peraturan ini ingin menjadikan kotim sebagai kota yang religius. Diharapkannya, setiap umat beragama bisa menjalankan keyakinannya dengan maksimal sesuai dengan agamanya masing-masing.

Selain religius, sosok Supian Hadi juga mempunyai citra gaul dan kekinian. Disamping menjabat sebagai Bupati Sampit, Supian Hadi juga dikenal menjadi seorang musisi. Oleh karena itu istilah “gaul” selalu melekat pada dirinya. Penampilannya sangat modis mengikuti trend anak muda milenial. Dan yang *ketiga* citra yang muncul tentang Supian Hadi

11 Instruksi Bupati Kotim No. 090/56/TRAMTIBUM/2017.

adalah Merakyat. Supian Hadi Sering sekali terjun langsung ke masyarakat menyaksikan berbagai permasalahan mereka dan mendengarkan langsung keluh kesah mereka.

Supian Hadi sebenarnya adalah keturunan banjar dan mengabdikan masa kecil hingga remajanya di sana. Banjar memang daerah yang terkenal lebih Islami karena kerajaan Islam Banjar punya andil besar dalam penyebaran agama Islam di Sampit. Sebagian besar masyarakat Banjar mempunyai sikap fanatik dalam beragama, hal ini bisa dilihat dari banyaknya pondok pesantren di daerah tersebut, masjid-masjid yang megah dan para ulama yang juga sering bertandang ke Sampit menyampaikan syiar agama. Nilai-nilai budaya dan keislaman itulah yang kemudian menyatu dalam diri bupati Sampit yang secara tidak langsung mempengaruhi gaya dan tingkah lakunya yang terkesan religius dan kemudian dia ekspresikan ke dalam pola pemerintahannya dengan menampilkan simbol-simbol agama Islam ke depan publik dalam bentuk seni arsitektur bangunan, yang mana dalam hal ini Supian Hadi juga adalah pekerja seni, sehingga dia mempunyai selera seni tersendiri, termasuk dalam hal ini seni kubah dan kaligrafi yang kemudian secara tidak langsung menjadi corak dan identitas politik pemerintahannya.

Nilai-nilai yang Mengobsesi Tindakan Politik di Kota Sampit

Prinsip dari teori interaksionisme simbolik berasumsi bahwa tindakan seseorang berdasar atas makna yang mereka miliki. Dalam hal ini hasilnya sekaligus dilihat dalam interaksinya di tengah masyarakat. Dari sini kemudian aktor berekspresi dengan menggunakan simbol-simbol sebagai media untuk berinteraksi. Bupati Sampit yang merupakan penganut agama Islam dan masyarakat Sampit yang juga mayoritas beragama Islam saling berinteraksi. Dalam proses interaksi itulah mereka memahami makna dari simbol-simbol tertentu yang akhirnya mereka ekspresikan dengan simbol-simbol agama yang mereka anut. Secara tidak langsung mengasosiasikan

dirinya maupun komunitasnya sesuai dengan nilai dan motivasi yang membentuk mereka yang merupakan sesuatu yang efektif untuk mengenali identitas sang Bupati sekaligus masyarakat yang dipimpinnya. Dalam kajian ini setidaknya ada beberapa hal yang mengobsesi tindakan aktor untuk mengekspresikan makna ke dalam symbol-simbol tertentu dan sekaligus mempunyai nilai-nilai, yakni; nilai agama, nilai seni, dan kepentingan politik.

Menurut data yang ada, Salah satu yang mengorientasi kebijakan *cultural symbol* ini adalah agar masyarakat Sampit tergerak hatinya untuk lebih mengingat Tuhannya dan meminimalisir tindakan kriminal yang dulunya sering terjadi, seperti kebut-kebutan, pencurian, mabuk-mabukan dan perbuatan mesum. Jadi *cultural symbol* yang ditunjukkan oleh Bupati Sampit ini merupakan suatu etika keagamaan saja, dimana sebagai seorang muslim, dirinya pribadi mempraktekkan ajaran agamanya itu ke tengah publik yang juga mayoritas sepemahaman dengan dirinya. Kaligrafi yang menghiasi beberapa bangunan adalah suatu pengamalan nilai-nilai Islam, yaitu agar ingat akan Tuhan mereka. Inilah yang kemudian masuk ke dalam nilai agama (*religious value*).

Simbol Bupati Sampit yang “gaul” dan gayanya yang fashionable, sekaligus menyiratkan bahwa sang Bupati adalah seorang yang sangat memperhatikan nilai estetika dari sesuatu, termasuk dalam hal ini pembangunan infrastruktur yang menjadi target pembangunannya. Kubah dan kaligrafi Arab dipilih sebagai nilai seni yang dimiliki olehnya sebagai seorang pemimpin muslim.

Simbol dan kekuasaan selalu mempunyai hubungan. Pada satu sisi simbol mengukuhkan kekuasaan dan pada saat yang lain kekuasaan melahirkan simbol. Pierre Bourdeu menyuguhkan pembacaan kritis tentang simbol yang dijadikan alat pembenaran bagi selera budaya penguasa. Dengan modal sosial, intelektual dan finansialnya kelompok ini memproduksi simbol, memberi makna, mengurangi atau menambah

simbol untuk kepentingan kekuasaannya (Bourdieu 2014). Kekuatan simbol mengungkapkan sesuatu tanpa harus menjelaskan sesuatu, sehingga digunakan seseorang untuk mengokohkan identitasnya, agar ia dipersepsi orang lain seperti yang ia harapkan. Jika berhasil, maka ia akan memperoleh keuntungan sosial yang banyak bisa berupa rasa hormat, wibawa, kekaguman atau semacamnya.

Tindakan politik bupati Sampit ini tidak lepas dari kepentingan politik bupati Sampit. Dia menggunakan simbol sebagai strategi memikat hati masyarakat Sampit yang mayoritas adalah Islam untuk mempertahankan kekuasaannya, karena daya kekuatan symbol adalah dapat mengungkapkan sesuatu tanpa harus menjelaskan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dengan simbol, Bupati dapat dengan leluasa menginterpretasikan dirinya dan mempengaruhi emosi masyarakat sampit yang mempunyai kesamaan makna dan nilai dengan dirinya sehingga secara tidak sadar menarik simpati masyarakat tersebut untuk terus mendukung kepemimpinannya sampai sekarang.

Tindakan politiknya yang tiba-tiba memunculkan simbol-simbol tersebut bukanlah suatu tindakan politik yang bertujuan untuk membuat Sampit menjadi kota Islam, karena dari penggalian data, tidak ada tindakan-tindakan konkrit yang menuju ke arah sana, seperti adanya penyuluhan tentang Islam, formulasi Islam ke dalam peraturan daerah, kewajiban memakai jilbab dan lain sebagainya. Bupati hanya tiba-tiba memunculkan simbol tersebut, karena dia menyukai seni tersebut, Sehingga tindakan politik tersebut bukanlah *cultural symbol* yang dimunculkan sebagai ekspresi suatu budaya tertentu pada daerah yang multi etnik seperti sampit, tetapi hanyalah *cultural symbol* suatu elit yang sedang berkuasa, yang kemudian mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat dan loyalitasnya dikarenakan kesamaan nilai-nilai yang dianut. *Cultural symbol* seperti ini tidak akan menimbulkan resistensi ataupun konflik berarti karena hanya sebatas ekspresi nilai-nilai kepercayaan yang dianut oleh sang aktor, tidak menyentuh identitas asli kesukuan daerah Sampit.

Cultural Symbol Sebagai Politik Identitas

Cultural symbol yang dilakukan di daerah multi-etnik seperti Sampit, secara teori sangat berbahaya karena akan memicu konflik. Teori sentimen primordial Clifford Geertz mengatakan bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama merupakan sumber konflik. Jika terjadi dominasi simbol-simbol tertentu dari suatu agama ataupun budaya maka akan menyebabkan resistensi atau pertarungan identitas yang akan memicu terjadinya konflik. Namun hal ini tidak terjadi di Sampit. Justru malah semakin menaikkan pamor Bupati Sampit dan membuatnya melenggang ke kursi kepemimpinan selanjutnya. Memang, politik identitas esensinya adalah upaya untuk mencapai kekuasaan tertentu dalam kehidupan dan panggung politik. Jika merujuk pada apa yang dikemukakan Castells tentang pembentukan pembangunan identitas, maka politik identitas yang dimainkan bupati Sampit ini adalah pembangunan identitas proyek (*project identity*) yaitu suatu identitas di mana aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan posisi-posisi baru dalam masyarakat sekaligus mentransformasi struktur masyarakat secara keseluruhan (Buchori 2014).

Politik identitas yang dilakukan bupati Sampit ini bukanlah politik identitas yang terang-terangan memformalkan idealismenya ke permukaan, atau melakukan formalisasi syariah ke dalam kehidupan masyarakatnya seperti membuat undang-undang syariah, mewajibkan pemakaian jilbab untuk wanita atau semacamnya. Sebaliknya Bupati Sampit menggunakan *soft power* dengan memainkan simbol-simbol Islam yang kemudian mempengaruhi masyarakat Sampit secara emosional dan secara tidak sadar mempengaruhi mereka untuk kemudian mendukung pemerintahan Bupati Sampit ini. Selain itu, politik identitas dengan permainan simbol ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan Sampit, yaitu: sebagai pembuka perubahan, sebagai identitas, dan sebagai simbol majunya pembangunan.

Arsitektur merupakan sebuah produk hasil adaptasi atau respon manusia terhadap perkembangan budaya, ekonomi dan lingkungan. Sebagai artefak budaya, arsitektur memiliki tendensi untuk menjadi sesuatu yang sifatnya simbolik. Dengan kata lain perwujudan fisik suatu objek arsitektural baik secara keseluruhan maupun parsial akan menjadi suatu simbol dengan makna tertentu.

Kajian ini sekaligus menegaskan bahwa terlepas dari kepentingan politiknya, *cultural symbol* yang dilakukan Bupati Sampit juga berorientasi fungsional praktis, yaitu untuk mengingatkan warga Sampit agar bertindak dan bersikap lebih religius dan mengikuti norma-norma agama. Pemasangan kaligrafi *asmaul husna* di beberapa jalan utama, dan ukiran kaligrafi di beberapa fasilitas publik mempunyai tujuan agar masyarakat Sampit selalu mengingat Tuhannya dalam setiap aktivitas, sehingga mencegah mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama. Misalnya kebut-kebutan di Jalan, berbuat mesum di tempat umum atau mencuri. Karena hal tersebut sering terjadi di kota Sampit.¹²

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah terlepas dari lingkungan yang membentuk diri mereka. Begitu juga simbol yang tertuang dalam seni arsitektur secara tidak sadar akan memengaruhi pola perilaku manusia yang hidup di dalamnya. Seperti yang dikemukakan oleh Winston Churchill "*we shape our buildings, and they shape us*". Ketika manusia membangun sebuah bangunan demi pemenuhan kebutuhannya, maka kemudian bangunan tersebut akan membentuk perilaku manusia yang hidup di dalamnya, mempengaruhi cara mereka dalam menjalani kehidupan sosial dan nilai-nilai yang ada dalam hidup. Seperti misalnya saja rumah yang dulunya tidak ada ruang makan atau meja makan, setiap anggota keluarga akan makan sendiri-sendiri dan di tempat yang mereka sukai, entah itu di ruang tamu atau bahkan di kamar tidur. Perubahan akan terasa ketika kemudian dibangun ruangan khusus untuk makan, mereka

12 Wawancara random dengan beberapa warga masyarakat Sampit

akan makan bersama setidaknya satu kali dalam sehari sehingga membuat hubungan kekeluargaan menjadi lebih intim. Sehingga beberapa hal ini dapat dikategorikan ke dalam symbol sebagai pembuka perubahan di Sampit.

Sebagai kota niaga, sekaligus sebagian besar penduduknya pendatang yang berdomisili di Sampit untuk bekerja, maka agak sulit menentukan sebenarnya apa identitas kota tersebut. Kebanyakan orang mengenal Sampit sebagai kota yang dulu pernah terjadi konflik kesukuan, tidak ada yang lain yang menunjukkan keidentikan kota ini. Jika merujuk pada identitas yang dibentuk secara primodialisme tentunya adalah identitas dayak, yang merupakan identitas penduduk asli yang mendiami Kalimantan Tengah. Namun kemudian identitas ini seperti memudar karena terdapat kelompok-kelompok berlatar belakang etnik tertentu yang hidup serta hadir di wilayah tersebut sebagai bagian dari perpindahan penduduk, sehingga komposisi masyarakat menjadi masyarakat multietnik yang terdiri dari berbagai macam suku. Maka tak heran jika siapapun yang bertandang ke Sampit, akan kesulitan menemukan sesuatu yang otentik, identik atau khas dari Sampit. Namun yang menarik adalah, meskipun terdiri dari banyak suku, kebudayaan dan adat istiadat, masyarakat Sampit terikat dalam satu ikatan keagamaan, yaitu agama Islam. Selain karena mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam baik itu warga asli maupun pendatang, juga karena nilai-nilai Islam dianggap sejalan dengan falsafah *huma betang*, sehingga bisa diterima oleh warga asli yang notabene masih memeluk Kaharingan.

Sebagaimana dalam modernitas, identitas menjadi masalah personal sekaligus teoritis. Dalam diri personal, seseorang tidak pernah yakin akan pilihan identitasnya. Apakah dia sudah memilih identitas yang sejati ataupun identitas secara utuh. Diri modern akan sadar sifat bentukan identitas dan bahwa seseorang selalu dapat mengubah atau memodifikasi identitasnya. Mereka juga cemas dengan pengakuan dan pengabsahan identitas oleh

yang lain, lebih jauh modernitas juga melibatkan sebuah proses inovasi, pembalikan terus menerus dan kebaruan (Kellner 2010). Hal inilah yang juga terjadi pada Bupati Sampit sebagai aktor dalam Kajian ini.

Image kota Sampit yang dulunya dikenal sebagai kota konflik, menurutnya harus berubah. Sampit harus dikenal sebagai kota yang sudah aman, tenang dan damai. Sampit memerlukan *image* tersebut agar investor tidak takut untuk menanamkan modalnya di Sampit sehingga perkembangan ekonomi Sampit akan terus maju. Keberagaman suku dan budaya di Sampit membuatnya tidak mungkin menonjolkan simbol kebudayaan suku tertentu, karena sesuai dinamika sosial yang terjadi di Sampit, isu-isu kesukuan sudah pasti memunculkan konflik. Oleh karena itu dia menggunakan "*soft power*" dengan bermain dalam ranah simbol keagamaan yang mana menjadi agama mayoritas di Sampit yang kemudian dianut baik oleh suku asli maupun pendatang. Dengan begini, sangat kecil kemungkinan untuk terjadi resistensi atau konflik di kemudian hari. Akhirnya, kota Sampit muncul dengan *image* baru menjadi kota yang terlihat lebih Islami dan religius.

Salah satu wujud dari politik identitas yang biasanya menjadi wacana politik para elit lokal di antaranya adalah isu-isu pemekaran daerah, keadilan sosial dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah ini juga yang menjadi wacana politik Bupati Sampit. Proses pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dan keinginan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi proses pembangunan tersebut. Dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang menentukan, yaitu SDM yang memiliki perubahan mindset atau pola pikir yang lebih maju daripada sebelumnya.

Kota yang mengalami keterpurukan pasca konflik sara tahun 2001 silam, yang membuat kegiatan ekonomi, politik dan sosial menjadi lemah.

Dalam kondisi seperti ini, wacana pembangunan menjadi suatu hal yang sangat diidamkan dan diharapkan oleh masyarakat Sampit. Harapan tersebut semakin terealisasi ketika bupati Sampit Supian Hadi memimpin daerah ini dengan komitmennya melakukan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas masyarakat seperti pusat perbelanjaan, mall, tempat wisata dan beberapa fasilitas publik lainnya. Simbol-simbol Islam yang dimainkan bupati dalam pembangunan tersebut tidak menjadi masalah bagi warga Sampit karena yang terpenting adalah pembangunannya. Sebaliknya, Simbol-simbol Islam yang ditampilkan tersebut mampu merubah *mindset* atau pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa *cultural symbol* yang dimainkan bupati mampu menggerakkan pembangunan dan loyalitas masyarakat Sampit sehingga bupati Sampit mampu melanggengkan kekuasaannya dan terpilih kembali sebagai bupati Sampit selama dua periode.

Kesimpulan

Bupati Sampit Supian Hadi dalam menjalankan kebijakannya dengan menampilkan simbol-simbol Islam yang termanifestasikan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Bangunan tersebut menjadi identik dengan seni arsitektur Islam seperti kubah dan kaligrafi. *Cultural Symbol* yang diaplikasikan dalam kebijakan politiknya seperti: pembangunan kaligrafi *asmaul husna* di beberapa jalan protokol, pembangunan *Islamic Centre*, Kubah di setiap kantor dinas, nuansa Islam di bundaran perdamaian dan taman kota Sampit.

Ada beberapa nilai yang mengobsesi tindakan *Cultural Symbol* di Sampit, di antaranya yaitu; *pertama*, Nilai Keagamaan, salah satu yang mengorientasi kebijakan cultural simbol ini adalah agar masyarakat Sampit tergerak hatinya untuk lebih mengingat Tuhannya dan meminimalisir tindakan criminal yang dulunya sering terjadi, seperti kebut-kebutan, pencurian dan perbuatan mesum. *Kedua*, Nilai Seni, simbol-simbol yang

dipakai seperti kubah dan kaligrafi *asmaul busna* maupun kaligrafi tulisan Allah dan Muhammad adalah ekspresi dari nilai seni arsitektur yang dimiliki bupati Sampit yang dipakai untuk memperindah kota Sampit. *Ketiga*, Kepentingan Politik, setiap kebijakan yang dilakukan oleh suatu elit pasti tidak lepas dari kepentingan politik, tidak terkecuali bupati Sampit, yang dalam hal ini adalah untuk melanggengkan kekuasaannya, mengingat bupati tersebut berkuasa selama dua periode ini dan masih berkuasa sampai tahun 2020 nanti.

Nilai-nilai tersebut di atas sebagai bentuk dan apresiasi keyakinan bupati dalam beragama, dan inilah yang disebut artikulasi kognitif dengan menampilkan kubah, kaligrafi dan *asmaul busna* ini adalah sebuah ekspresi seorang muslim yang selalu menonjolkan simbol-simbol keislamannya, Sebagai ekspresi seorang muslim yang sudah terarahkan pada pengetahuan dan pemahaman agamanya yang juga merupakan symbol etika seorang muslim. Hal ini memang tidak terlepas dari kepentingan politik dalam membangun politik identitas Bupati.

Nilai-nilai yang mengobsesi kebijakan Bupati Sampit tersebut dapat disimpulkan bahwa *cultural symbol* yang terjadi di Sampit bukanlah simbol yang dimunculkan sebagai suatu ekspresi kebudayaan tertentu pada daerah multietnik seperti sampit, tetapi hanyalah sebatas *cultural symbol* suatu elit yang sedang berkuasa. *Cultural symbol* seperti ini tidak akan menimbulkan resistensi ataupun konflik berarti karena hanya sebatas ekspresi nilai-nilai kepercayaan yang dianut oleh sang aktor, yang kebetulan juga dimiliki oleh mayoritas masyarakat Sampit, dan tidak menyentuh identitas asli kesukuan daerah Sampit.

Referensi

- Abbas, Moh. Raffi. 2016. "Ruang Publik Dan Ekspresi Politik Identitas: Studi Tentang Pergulatan Identitas Ke-Papua-an Di Yogyakarta." *Jurnal Society* VI (1): 23–34.
- Bagong Suyanto, Dkk. 2011. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Belly, Rayano, and Retno Widjajanti. 2017. "Persepsi Masyarakat Bermukim Di Tepian Sungai Pemuatan Kecamatan Bamaang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 13 (3): 369–84. <https://doi.org/10.14710/pwk.v13i3.17480>.
- Bourdieu, Pierre. 2014. *Menyingkap Kuasa Simbol*. Edited by Fauzi Fashri. Yogyakarta: Jala Sutra.
- Buchori, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Elbadiansyah, Umiarso dan. 2014. *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fanzuri, Hamzah. 2017. "Politik Pencitraan, Penguasaan Simbol Dan Kekerasan Simbolik Sebagai Alat Reproduksi Kekuasaan." *Www.Kompasiana.Com*. 2017.
- Fikri, Sirajudin. 2018. "Politik Identitas Dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito Dalam Demokrasi Lokal)." *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 18 (2): 167–81. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i2.2701>.
- Hakiki, Kiki Muhamad. 2011. "Politik Identitas Agama Lokal: Studi Kasus Aliran Kebatinan." *Analisis* XI (1): 159–74.
- Hamid, Asep Lukman. 2018. "Politik Identitas Agama Lokal Studi Tentang Aliran Kepercayaan Perjalanan Ciparay Bandung." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 2 (1): 113–30. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v2i1.22.
- Herusatoto, Budiono. 1998. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: PT. Hanindita.

- Kellner, Douglas. 2010. *Budaya Media Cultural Studies, Identitas Dan Politik Antara Modern Dan Post Modern*. Edited by Galih Bondan Rambatan. Yogyakarta.
- Khoiruddin Bashori, Abd. Madjid, Mahli Zainuddin Tago. 2012. "Dinamika Konflik Dan Integrasi Antara Etnis Dayak Dan Etnis Madura: Studi Kasus Di Yogyakarta Malang Dan Sampit." *Afkaruna* 8 (1): 60–79. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2012>.
- Kotim, BPS. 2017. "Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Dalam Angka 2017."
- Mahin, Marko. 2009. "Kaharingan, Dinamika Agama Dayak Di Kalimantan Tengah." Universitas Indonesia.
- Maksum, Ali. 2015. "Politik Identitas Masyarakat Tengger Dalam Mempertahankan Sistem Kebudayaan Dari Hegemoni Islam Dan Kekuasaan." *el-Harakah* 17 (1): 18. <https://doi.org/10.18860/el.v17i1.3083>.
- Notapiri, Tilas. 2017. "Statistik Daerah KOTIM-2017." Kotawaringin Timur.
- Purnawa, Bambang H Suta. 2016. "Konflik Antar Komunitas Etnis Dan Representasi Identitas Etnis Di Sampit, Kalimantan Tengah." *Www.Danurweda*. 2016.
- Rahim, Idris. 2010. "Identitas Etno Religi Dalam Pembentukan Provinsi Gorontalo." UIN Yogyakarta.
- Saputro, Agus. 2018. "Agama Dan Negara : Politik Identitas Menuju Pilpres 2019." *Asketik* 2 (2): 111–20. <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912>.
- Setyobudi, Imam. 2017. "Politik Identitas Animal Pop Dance: Subbudaya Dan Gaya Hidup Hibrid." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12 (1): 55. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1286>.
- Suryani, Dini. 2012. "Konflik Dan Resolusi Konflik Perbandingan Di Sambas Dan Sampit." *Pusat Penelitian Politik* Vol 9 (1): 143–58.
- Sutrisno, Mudji. n.d. *Cultural Studies, Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*. Depok: Koekoesan.